

Susunan Redaksi

Media Komunikasi Kabupaten Bantul
BIWARA
Berita Wakil Rakyat

Penanggung Jawab
Pimpinan DPRD Bantul

Pimpinan Redaksi
Prpta Nugraha, S.Sos.,MH

Wakil Pimpinan Redaksi
Anton Vektor, S.STP,M.Eng

Redaktur Pelaksana
Hari Triwahyudi, S.IP.,M.Sc.

Sekretaris Redaksi
Endaryati Widiastuti, SE

Staf Redaksi
Fera Selawati, S.Pd.

Fotografer
Rizky Satria Mahendra

Distribusi
Tugiyat



Facebook : DPRD Kabupaten Bantul

Salam Redaksi

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan prioritas pembangunan kabupaten Bantul tahun 2023, pertumbuhan ekonomi inklusif ini memfokuskan kepada peningkatan kualitas SDM dan peningkatan produktifitas sector unggulan di Kabupaten Bantul.



Prioritas pembangunan kabupaten Bantul tahun 2023dijabarkan dalam enam prioritas pembangunan daerah tahun 2023, antara lain 1) pengurangan kemiskinan, 2) peningkatan kualitas SDM, 3) penguatan ekonomi sector unggulan, 4) pemantapan pelayanan publik berbasis teknologi informatika, yang 5) peningkatan infrastruktur kewilayahan dan pendukung ekonomi kewilayahan, serta yang 6) peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Senada dengan prioritas pembangunan Pemerintah kabupaten Bantul, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bantul mengatakan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemic mutlak untuk di prioritaskan, DPRD Kabupaten Bantul akan senantiasa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyukseskan pemulihan ekonomi rakyat.

Biwara edisi 1 tahun 2023 akan mencoba mengangkat sector ekonomi rakyat menjadi salah satu andalan warga masyarakat kabupaten Bantul.

DAFTAR ISI

1	Audiensi BMPS dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul
2	DPRD Dorong Modernisasi Pasar Tradisional
4	Ketua DPRD hadir pelatihan 21 Lurah masa jabatan 2022 - 2028 Kabupaten Bantul
5	Komisi A DPRD Kabupaten Bantul Mengunjungi longsor di Selopamioro
7	Komisi B DPRD Kabupaten Bantul Minta rencana kenaikan cukai dipertimbangkan kembali
8	Komisi B DPRD Kabupaten Bantul Sambangi petani terdampak luapan air di Kabupaten Bantul
9	Kebutuhan ikan dipasok luar daerah Komisi B DPRD Kabupaten Bantul dorong pengembangan sektor perikanan
10	Ayo jalan-jalan ke Pasar Rakyat Pasar Gumulan
11	Pasar Bantul
12	Pasar Janten
13	Pasar Imogiri
14	Pasar Ngipik
15	PDIP Bantul Berduka
17	Pemulihan ekonomi target APBD 2023
18	Pimpinan DPRD temui aksi damai FSO Kabupaten Bantul
19	Rapat Paripurna penyampaian laporan Bapemperda dan pengambilan keputusan Propemperda tahun 2023
20	Mangut Lele Bu Is & Sate Pak Bari
21	Sidak Komisi D DPRD Fasilitas Pendidikan Dasar di Bantul
22	Sosialisasi Edukasi Kanker
23	Pembangunan sebagai Aspek Penting dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

AUDIENSI BMPS

dengan KOMISI D DPRD Kabupaten Bantul



Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) audiensi dengan Komisi D di gedung DPRD Bantul, Kamis (13/10). "Masih ada guru yang menerima honor Rp 500 ribu per bulan," jelas Suratman. Bagi Suratman, kecilnya honor itu merupakan ironi, meskipun guru-guru itu mengabdikan di yayasan. Kecilnya honor itu tidak sebanding dengan perjuangan mereka ketika mengenyam pendidikan hingga strata satu. "Mereka punya peran vital. Iktu mencerdaskan anak-anak Bantul," ucapnya. Pada kesempatan kali ini, Suratman mengatakan, BMPS melalui Komisi D meminta pemerintah kabupaten ikut meningkatkan kesejahteraan para guru. Setidaknya dengan memberikan tambahan insentif agar pendapatan guru minimal setara dengan upah minimum kabupaten.



"Masukan-masukan itu kami terima dan akan kami bahas di komisi," ujar politikus PDI Perjuangan ini. Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Yasmuri mengungkapkan hal senada. Menurutnya, pemerintah kabupaten sebenarnya telah memberikan insentif kepada guru yang mengabdikan di

lingkungan yayasan. Namun, insentif itu hanya diberikan kepada guru yang terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik). "Nilainya beragam karena ada penjenjangan, tergantung masa pengabdian. Paling tinggi Rp 1 juta," sebutnya. Ya, Pemkab memang tidak bisa sembarangan memberikan insentif.

Pemkab hanya mengacu dapodik. Sebab, dapodik merupakan sistem pendataan berskala nasional yang telah terintegrasi. "Karena basisnya kan dapodik," ungkap Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Muhammad Agus Sofyan. Politikus PKS ini tak menampik jumlah guru yang belum terdata di dapodik cukup banyak. Hal tersebut disebabkan karena yayasan tidak segera mengeluarkan surat keputusan (SK) guru. Lantaran yayasan awalnya hanya mencari guru pengganti. Padahal, SK guru menjadi syarat untuk mendaftar di dapodik. "Karena guru yang lama diterima di sekolah negeri," tuturnya.

Kata Agus, selain honor BMPS juga menyampaikan beberapa persoalan lain diantaranya kualitas infrastruktur sekolah dan berbagai persoalan di seluruh jenjang Pendidikan, mulai PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga SMA. Kendati begitu, Agus menekankan, kewenangan Pemkab terbatas, yakni mulai PAUD hingga SMA. "Kalau SMA masuk wilayahnya provinsi sehingga menjadi kewenangan provinsi untuk menuntaskan persoalan ini," katanya

DPRD Dorong Modernisasi Pasar Tradisional



Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bantul mendampingi Bupati Bantul meresmikan Pasar Turi.



Keberadaan pasar, khususnya pasar rakyat merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Dengan masih hidupnya pasar rakyat ini, tentunya dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Kabupaten Bantul sangat heterogen. Sebagian besar masyarakat memiliki daya beli yang cukup besar dan tetap memilih berbelanja di pasar rakyat dibandingkan di pasar modern dengan sejumlah alasan, diantaranya

karena barang yang diperjualbelikan lebih segar dan berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau. Dilatarbelakangi hal tersebut diperlukan upaya kita bersama untuk mempertahankan keberadaan pasar rakyat agar tidak tergerus keberadaan pasar modern. Hilangnya pasar rakyat dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait dengan menurunnya daya beli serta melemahnya sektor perdagangan informal.





“PASARE RESIK, ATINE BECIK, REJEKINE APIK”

Ungkapan ini perlu kita pahami dan hayati. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah sebagai penyedia fasilitas serta warga pasar itu sendiri untuk bersama-sama menciptakan pasar rakyat menjadi tempat transaksi yang layak tanpa harus menghilangkan ciri khas pasar rakyat.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih dalam sambutannya berharap setelah proses revitalisasi pasar ini lebih banyak warga yang merasa aman dan nyaman berbelanja di pasar. Pembersihan fasilitas pasar juga perlu diikuti dengan pembersihan penataan barang dagangan agar lorong pasar



terbebas dari barang dagangan dan nyaman untuk berlalu lalang. Keberadaan pasar modern dan selera masyarakat saat ini yang serba praktis dan menginginkan kenyamanan adalah sebuah perubahan yang harus dihadapi dan disiasati pasar tradisional. Pedagang harus jeli dengan kebutuhan konsumen saat ini, kelebihan pasar sebagai penyedia bahan segar harus diperkuat menjadi bahan segar organik. Terlebih masyarakat saat ini, lebih peduli pada kesehatan sehingga memilih produk segar organik dan aman dari kandungan bahan berbahaya. Apresiasi dinas terkait yang telah memperbaiki konsep pasar tradisional menjadi lebih nyaman bagi pelanggan dan pedagang itu sendiri.

Jika seluruh elemen pasar tradisional baik pengelola, pedagang, dan pembeli dapat bersama-sama menjaga kebersihan, memberikan pelayanan yang ramah, dan memuaskan bukan tidak mungkin masyarakat akan lebih memilih berbelanja di pasar tradisional dibandingkan di pasar modern.

KETUA DPRD Hadiri Pelantikan **21 LURAH** Masa Jabatan 2022-2028 Kabupaten Bantul



Ketua DPRD Kabupaten Bantul menghadiri pelantikan 21 lurah terpilih masa jabatan 2022-2028 pada Sabtu (5/11/2022) di Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul.

Lurah terpilih dilantik langsung oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. Para lurah ini adalah yang terpilih dalam tahapan pemilihan lurah (pilur) yang dinilai bupati telah berjalan dengan baik, lancar, aman, dan damai. Bupati berharap para lurah yang dilantik dapat

menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

"Saya berharap para lurah mampu membawa perubahan di kalurahan masing-masing dengan menyusun rencana pembangunan jangka menengah kalurahan (RPJMKal) yang inovatif, adaptif yang juga mengakomodasi kearifan lokal serta selalu bersinergi dengan semua elemen yang ada di kalurahan, bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat," ujarnya.

Para lurah diminta untuk melakukan inovasi dan terobosan baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar pemerintahan kalurahan dapat berjalan secara efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan transparan.

Selain itu, seluruh elemen masyarakat harus dapat dirangkul dan digugah partisipasinya untuk bersama-sama mewujudkan harapan yang dicita-citakan.



KOMISI A DPRD Kabupaten Bantul Mengunjungi Longsor di Selopamioro



Jangan sampai bencana sampai merenggut korban jiwa di Bantul. Maka berbagai upaya harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. "DPRD Bantul, tentu memberikan dukungan terkait mitigasi bencana, baik dalam hal kebijakan ataupun dukungan anggaran," tandasnya.

Samino mengatakan kepada anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul bahwa longsor bukit pada sisi barat rumahnya itu terjadi pada Minggu (13/11/2022) malam usai wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Saat tengah istirahat bersama keluarganya, dia kaget mendengar suara keras reruntuhan. Ternyata setelah dicek tanah di dekat rumahnya longsor. Samino juga bersyukur bahwa

anggota DPRD Kabupaten Bantul cepat tanggap dengan musibah yang dialaminya."Nggih matur nuwun kagem Bapak/Ibu Dewan sampai lokasi. Kami berharap rumah kami bisa aman kembali," katanya.

Usai berdialog, Suratun menyerahkan bantuan sejumlah uang kepada Kasrini agar bisa digunakan untuk membantu keperluan keluarganya. Selain sepasang suami istri, di rumah tersebut turut tinggal dua anak mereka, yakni Hayarti dan Rian.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul, Hj.Suratun, S.H dan anggota H.Sukardiyono memberikan bantuan saat meninjau rumah milik Samino yang terancam longsor di RT 03, Siluk 2, Kalurahan Selopamioro, Imogiri, Senin (14/11/2022).





Lurah Sugeng mengatakan wilayahnya memang ada beberapa titik yang termasuk rawan bencana. Permukiman yang berada di tepi sungai sudah dilakukan relokasi. Sedangkan permukiman di perbukitan Siluk segera menyusul."Di Siluk ada 20 rumah yang rawan, karena tanah yang mereka tempati sewaktu-waktu bisa terkena longsor, maka dari itu rencana relokasi akan dilakukan. Kalau rumah Pak Samino ini dulu aman, tapi sekarang sudah mengkhawatirkan jadi akan segera kami tangani," katanya. Sementara itu, AgusYuli mengatakan, untuk menghadapi ancaman bencana, pihaknya telah meminta 29 lurah menyiapkan tempat evakuasi. Semua untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, misal harus evakuasi tidak bingung mencari tempat.

Adapun 29 kalurahan tersebut diantaranya Srimartani, Srimulyo, Wonolelo, Pleret, Wukirsari, Selopamioro, Girirejo, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah, Sriharjo, Tirtonirmolo, Bangunjiwo, Banguntapan, Bangunharjo, Guwosari, Sumbermulyo, Sidomulyo, Srigading, Parangtritis, Mangunan, Muntuk, Srihardono, Seloharjo, Wijirejo, Trimulyo, Poncosari, Trirenggo, dan Argosari."Penyiapan ini adalah bentuk antisipasi dan kita telah menetapkan darurat bencana hidrometeorologi sejak 26 September hingga 25 Desember. Hal ini bisa

diperpanjang mengingat informasi dari BMKG, puncak hujan diperkirakan pada bulan Februari hingga Maret 2023, meskipun bisa bergeser," kata AgusYuli.

Selain itu, pada 29 kalurahan tersebut juga dibentuk pos pantau bencana yang difungsikan mulai 14 Oktober silam. Pos pantau diberikan bantuan permakanan seperti gula, teh, kopi, minyak, dan mi instan.

Komisi A DPRD Kabupaten Bantul juga meminta kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk melakukan koordinasi terkait antisipasi bencana. Seperti, menyiapkan perahu karet, senso (gergaji mesin), tenda, dan keperluan lain yang dibutuhkan saat bencana."Harus dipetakan semua, mulai pembagian tugas, juga peralatan pendukung dan relawan agar Bantul bisa aman dan tidak ada korban akibat bencana," katanya. Tidak lupa, bupati juga meminta agar dilakukan pemangkasan batang pohon utamanya yang berada di tepi jalan raya. Rumah sakit diminta menyiapkan sarana kesehatan yang dibutuhkan."Bencana tidak pernah kita anggarkan secara definitif di OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Tetapi kita ada Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi bencana. Sekitar Rp 10 miliar, Insya Allah cukup. Tetapi semua tergantung intensitas dan eskalasi bencana. Kalau kurang ada lembaga seperti Baznas dan tentu gotong royong warga Bantul," katanya



KOMISI B DPRD Bantul

Minta Rencana Kenaikan Cukai Dipertimbangkan Kembali

Wakil Ketua Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, Aryunadi mengatakan bahwa pihaknya menerima audiensi dari federasi pekerja rokok Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dari audiensi itu, federasi menyampaikan keluhan atas pemerintah pusat menaikkan cukai. Ia menuturkan, federasi tersebut menyampaikan aspirasi, kegelisahan, kekhawatiran mengenai rencana pemerintah pusat menaikkan cukai. Mereka mengkhawatirkan kenaikan tersebut berdampak kepada keberadaan mereka bekerja di perusahaan rokok. Menurutnya, dari federasi menginginkan bahwa kenaikan tersebut ditunda terlebih dahulu. Lantaran kenaikan bea cukai ditakutkan berpengaruh kepada kenaikan komponen lainnya. "Kemudian jaminan bahwa pekerja rokok tidak ada pengurangan tenaga kerja (PHK)," ujarnya usai audiensi, Kamis (22/9).

"Kami selaku DPRD mendapat tugas dari pimpinan pusat untuk menemui mereka. Berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi itu, segera kami kirimkan kepada pemerintah pusat secepatnya," katanya yang tergabung dalam fraksi PDIP ini. Ia pun berharap pemerintah mempertimbangkan matang-matang kenaikan tersebut. Hal ini terkait dampak negatif kedepannya.

"Harapan kami memang pemerintah pusat mempertimbangkan rencana kenaikan cukai. Jangan sampai ada dampak negatif terhadap eksistensi

perusahaan-perusahaan rokok yang ada di daerah ini utamanya," ungkapnya. Selain itu, lanjutnya, jika nantinya kenaikan bea cukai dinilai yang terbaik, maka nantinya akan ada jaminan. Sehingga para karyawan masih dapat bekerja tanpa ada PHK. "Kalau itu keputusan yang terbaik, harapan kami ada jaminan. Perusahaan-perusahaan eksis, tidak melakukan PHK. Ada jaminan sehingga para pekerja tetap bisa bekerja di perusahaan rokok khususnya yang ada di daerah khususnya di Bantul," jelasnya

Kebutuhan lapangan kerja saat ini sangat banyak.





Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Bantul berdiskusi dengan petani kacang tanah yang terdampak hujan di Kabupaten Bantul

KOMISI B DPRD KABUPATEN BANTUL SAMBANGI PETANI TERDAMPAK LUAPAN AIR DI KABUPATEN BANTUL

Ratusan hektare lahan pertanian di sejumlah wilayah di Bantul terendam luapan air yang tak bisa dikendalikan. Ada beberapa komoditas ditengarai bakal kurang maksimal hasil panennya. Sementara Komisi B DPRD Bantul melakukan pantauan untuk mengetahui dampak banjir.

"Khusus di Kapanewon Bambanglipuro, area yang terdampak luapan air 287 hektare lahan kacang tanah, serta 269 lahan jagung. Tetapi tanaman tersebut relatif aman karena sudah masuk masa panen," ujar Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis SE didampingi Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul, Aryunadi SE disela memantau lahan di Sidomulyo, Bambanglipuro Bantul. Kunjungan tersebut juga didampingi Kabid Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul, Ir.Imawan Eko Handriyanto M.P.



Wildan mengatakan, memang ada lahan terdampak banjir. Tetapi melihat dari aspek umur sudah masuk musim panen. "Khusus di Bambanglipuro relatif aman karena sudah masuk masa panen, halter sebut sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh petugas PPL dilapangan tadi," ujarnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, Joko Waluyo mengatakan, secara keseluruhan lahan pertanian di Imogiri yang terendam banjir lahan sekitar 50 hektare. Sedangkan di Tirtohargo Kretek dan Srigading Sanden lahan pertanian yang terendam banjir mencapai 60 hektare. "Tanaman yang terendam didominasi tanaman cabai, kacang tanah, jagung hingga padi," ujarnya.

Menurutnya, komoditas pertanian yang berpotensi gagal panen jenis cabai merah besar. Tanaman ini jika terlalu banyak air menyebabkan buah cabai cepat layu dan membusuk. Terkait kerugian, DKPP hingga saat ini belum bisa memastikan. Pihaknya baru mendata lahan yang terendam air dan kemungkinan tanaman pertanian yang mati akibat terendam air.



Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Bantul berdiskusi dengan petani kacang tanah yang terdampak hujan di Kabupaten Bantul

Kebutuhan Ikan Dipasok Luar Daerah

Komisi B DPRD Bantul

Dorong Pengembangan Sektor Perikanan



KOMISI B DPRD KABUPATEN BANTUL



KOMISI B DPRD KABUPATEN BANTUL

Komisi B DPRD Bantul mendorong Dinas Perikanan dan Kelautan untuk bisa mengembangkan usaha di sektor perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluang usaha di bidang perikanan sangat terbuka, apalagi kebutuhan ikan banyak dipasok dari luar daerah. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul Aryunadi mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan banyak sektor terdampak. Namun sektor pertanian yang didalamnya terdapat perikanan dan peternakan mampu bertahan dan eksis.

"Kami komitment untuk mengawal sektor pertanian dengan rumpun perikanan dan peternakan menjadi prioritas karena terbukti mampu mensejahterakan rakyat," katanya, Selasa (4/10/2022). Komisinya sudah mengidentifikasi potensi usaha yang mungkin bisa dikembangkan. Salah satunya sektor perikanan seperti di bekas sentral pembenihan ikan Pavajo, Bantul. Meski dipegang pihak ketiga, namun usaha perikanan mereka cukup berhasil.

"Mengapa hal ini tidak dilaksanakan di masyarakat, bisa dengan pengembangan kolam terpal atau bulat untuk budidaya lele," katanya. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bantul ini melihat, kebutuhan ikan khususnya lele di Bantul sangat besar. Mayoritas ikan ini justru didatangkan dari luar daerah. Ketika masyarakat membudidayakan pasti akan terserap ke pasar. Apalagi

pengembangan ikan lele tidak butuh lahan yang luas. Masyarakat bisa memanfaatkan pekarangan dan lahan tidur."Kami siap mendukung dari sisi penganggaran, apalagi ini dinas baru harus mampu menciptakan inovasi program kerja," katanya.

Anggota Komisi B DPRD Bantul, Mahmudin mengatakan, sektor agro bisnis masih mendominasi mata pencaharian masyarakat Bantul yang masih didominasi dari sektor pertanian. Untuk itulah mereka mendorong agar ada pengembangan di sektor perikanan yang masih satu rumpun dengan pertanian. Kebutuhan ikan di Bantul per hari sekitar 15 ton dan hanya 3 ton yang dipenuhi dari ikan lokal.



KOMISI B DPRD KABUPATEN BANTUL



KOMISI B DPRD KABUPATEN BANTUL

Selbihnya harus diambilkan dari luar daerah. Hal ini menunjukkan peluang sektor perikanan masih besar dan memiliki manfaat yang besar. "Selain sumber protein, usaha perikanan ini akan menciptakan lapangan kerja dan sektor ekonomi. Ini peluang yang harus diraih," katanya. Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul Joko Waluyo membenarkan tingginya konsumsi ikan air tawar di Bantul. Sementara produksi di Bantul memang belum maksimal. Dinas akan terus memotivasi petani ikan agar intensif mengembangkan usaha perikanan. Mereka juga akan menggerakkan petani milenial agar tertarik untuk berusaha di sektor perikanan. "Kami akan motivasi mereka agar lebih intensif, menggandeng anak-anak muda milenial. Karena kalau hibah kami belum bisa karena terganjal aturan," katanya.

AYO JALAN-JALAN KE PASAR RAKYAT

Tempatnya Wisata Belanja dan Kuliner Khas (Tradisional)



Pasar Gumulan

Mencicipi Kuliner Legendaris Kupat Tahu Mbah Ponco

Jika Anda melancong ke Kabupaten Bantul rasanya tak lengkap kalau tak mampir ke Pasar Gumulan. Apalagi, jika Anda adalah pecinta kuliner.

Ya, ada kuliner kupat tahu di pasar rakyat yang terletak di Kalurahan Caturharjo, Pandak, itu. Kupat tahu ini salah satu kuliner legendaris di Bumi Projo Tamansari. Sudah ada sebelum kemerdekaan. Persisnya pada 1943. Namanya Kupat Tahu Mbah Ponco.

"Saya generasi kedua. Saya sendiri meneruskan usaha ini sejak 1999. Jadi usia kupat tahu ini sudah 79 tahun," jelas Mbah Darti, pemilik Kupat Tahu Mbah Ponco. Sekilas, kupat tahu ini mirip dengan kuliner serupa lainnya. Namun, bagi pecinta kuliner Kupat Tahu Mbah Ponco punya citarasa khas.

Perempuan 57 tahun ini mengaku tak punya bumbu rahasia. Namun, racikan bumbu dan air gula yang menjadi kuah kupat tahu Mbah Ponco disimpan dalam dua tempat khusus. Yakni, dua guci kecil. Dua guci itu

telah dipakai sejak Kupat Tahu Mbah Ponco berdiri. "Pernah memakai wadah lain. Tapi rasanya jadi berbeda," ucapnya.

Ciri khas lainnya adalah irisan tahu masih segar. Irisan tahu baru digoreng ketika ada konsumen yang memesan. Irisan tahu itu makin lengkap dengan tambahan tempe goreng yang dipotong kecil-kecil. Plus lempeng sego (kerupuk nasi, Red) di atasnya.

"Di tempat lain memakai kerupuk berwarna kuning itu," tuturnya. Saking legendarisnya, Kupat Tahu Mbah Ponco kerap dipesan khusus oleh pejabat maupun tokoh. Di antaranya, adik Presiden Soeharto, almarhum Probosutedjo. "Orang-orang Jakarta juga sering meminta kami, tapi kami tidak bisa kesana" katanya. Meski legendaris dan punya citarasa khas, harga seporsi Kupat Tahu Mbah Ponco sangat terjangkau. Seporsi hanya Rp 8.000. "Minumnya kami sediakan gratis berupa teh tawar," ucapnya. Saban hari, Mbah Darti dibantu menantunya. Yakni, Fitri Musiam. Kupat Tahu Mbah Ponco buka mulai pukul 16.00 hingga pukul 20.00. Namun, seringnya warung kupat tahu yang terletak di pojok kiri depan Pasar Gumulan ini tutup sekitar pukul 18.00. "Setiap hari bikin kupat 7 kilogram," sebutnya. (zam)

PASAR BANTUL

Menikmati Kopi dengan Suasana Titik Nol Kota Bantul

Ingin menikmati kopi dengan suasana khas Kota Bantul? Kedai Kopi Sari Wijoyo pilihannya. Ya, kedai kopi yang menyuguhkan beragam jenis kopi ini berada di titik nol Kota Bantul. Tepatnya di food court Pasar Bantul.

Ada beragam jenis menu kopi yang ditawarkan. Yang paling dominan kopi dengan teknik penyeduhan manual brew."Di Bantul banyak kedai kopi. Jadi, kami fokuskan manual brew," jelas Bagus Kuncoro Jati di Kedai Kopi Sari Wijoyo belum lama ini. Manual brew adalah salah satu jenis teknik penyeduhan kopi. Kopi diseduh dengan cara manual. Namun, manual brew memiliki beberapa cara. Di antaranya, tubruk, V60, dan vietnam drip. Nah, Kedai Kopi Sari Wijoyo menyuguhkan kopi dengan beragam cara penyeduhan manual brew itu."Bahkan, konsumen bisa memilih kopi yang halus atau kasar," ucapnya.

Pemilik Kedai Kopi Sari Wijoyo ini punya alasan khusus fokus berjualan kopi dengan teknik manual brew. Citarasa kopi yang diseduh dengan teknik manual ini lebih terasa. Cocok bagi pemburu kenikmatan kopi."Yang baru juga bisa tertarik dengan kopi," ujarnya.

Kendati begitu, kedai kopi yang berdiri April 2018 ini juga memiliki menu kopi lain. Sesuai selera

anak muda. Menurutnya, sebagian anak muda di Bumi Projo tamansari cenderung memilih kopi susu yang dicampur dengan rasa lain. Misalnya, vanilla, aren, dan salt caramel.

"Kalau cewek biasanya cappuccino yang di-blend," katanya. Kendati begitu, Kedai Kopi Sariwijoyo juga punya menu andalan kopi espresso. Yakni, kopi susu aren."Basic-nya espresso. Dicampur dengan susu UHT dan aren," jelasnya. Pemuda kelahiran 25 tahun ini menggaransi biji kopi yang digunakan merupakan pilihan. Biji kopi dengan kualitas menengah keatas. Namun, harga kopi di kedai ini tetap terjangkau. Termahal Rp 24 ribu.

"Kami juga ada cemilan. Seperti nugget, dimsum, dan singkong," tuturnya. Sebagai penikmat kopi, Bagus menganggap mencecap kopi dengan pemandangan titik nol Kota Bantul punya sensasi tersendiri. Bisa melihat lalu-lalang dan aktivitas warga di pusat Kota Bantul."Dan, mereka tidak bisa melihat kita. Karena lokasi kedai ada di lantai dua," katanya.

Lalu, kedai ini buka mulai jam berapa? Bagus menyebut mulai pukul 10.00 hingga pukul 24.00. Semula kedai ini buka mulai pukul 16.00."Kami ingin orang Bantul mengetahui kalau ingin menikmati kopi tanpa harus ke Jogja. Di Bantul pun ada," tambahnya. (zam)



Pasar rakyat di Kabupaten Bantul ternyata sangat komplet. Bahkan ada yang punya spesialisasi sebagai tempat kulakan.

Dari 32 pasar rakyat se-Bantul, Pasar Janten yang paling mashur sebagai tempat kulakan. Meski, pasar yang terletak di Pedukuhan Janten, Ngestiharjo, ini baru berdiri pada 2005.

"Baru 16 tahun usianya," jelas Pengurus APPSI Pasar Janten di kantornya kemarin (1711).

Pasar Janten tidak muncul tiba-tiba. Sumardi menceritakan, semula ada tempat kulakan di Pedukuhan Janten. Saking ramainya, antrean di toko itu sangat panjang. Hingga meluber ke jalan raya.

"Saya kemudian berinisiatif membuatkan tempat di sebelahnya," kenangnya.

Singkat cerita, Sumardi berinisiatif mengajukan pembangunan pasar kepada pemkab. Gayung bersambut, pemkab mengabulkan permohonan itu. Hingga pemkab mendirikan bangunan permanen pasar. "Dulu ini tanah warga lalu dibeli pemkab," tuturnya.

Pensiunan Satpol PP Bantul ini menyebut Pasar Janten hanya memiliki 52 los. Namun, jumlah pedagang yang mengais rezeki di pasar mencapai seratusan orang. "Total ada 200 orang setiap harinya. Itu sudah termasuk pembelinya," sebutnya. Yang menarik, sebagian pedagang di Pasar Janten juga



Pasar Janten

Pusat Kulakan Jajanan Pasar dengan Harga Supermurah



berstatus sebagai pembeli. Setelah dagangannya ludes terjual, mereka membeli jenis dagangan lain dari penjual. Itu untuk dijual di daerah masing-masing.

Ya, sebagian pedagang berasal dari luar DIY. Misalnya, Magelang, Kutoarjo, Solo, hingga Sragen. "Jadi, untung mereka berlipat. Datang ke pasar untung karena dagangannya laku. Pulang kerumah juga untung karena menjual dari kulakan," ucapnya.

Di mata pedagang, Pasar Janten sudah memiliki trademark. Sebagai pusat kulakan jajanan pasar. Nyaris seluruh jajanan pasar yang dijual di seluruh pasar rakyat di DIY berasal dari Pasar Janten. Termasuk di antaranya jajanan pasar di Pasar Kranggan. Lantaran harganya memang miring. Satu bungkus kue jipang, misalnya, harganya hanya Rp 16 ribu. Isinya 50 kue jipang. Dengan kata lain, harga satu kue jipang Rp 320. Padahal, pengecer biasanya menjual minimal dengan harga dua kali lipat. Di antara jajanan lain di Pasar Janten adalah bakpau, roti, keripik, lempeng, moto kebo, hingga aneka jenis kerupuk.

"Malamnya kulakan di sini lalu esoknya dijual di pasar-pasar," ungkapnya.

Ya, Pasar Janten tidak buka seperti pasar rakyat lainnya. Pasar Janten mulai buka pukul 18.00 hingga pukul 21.00. Bahkan, sebagian pedagang masih ada yang bertransaksi hingga pukul 22.00. Namun, lokasinya di luar pasar. (zam)

Pasar Imogiri

Pisang Rajanya Langgan Favorit GKR Mangkubumi

Pasar Imogiri punya daya tarik tersendiri. Pasar rakyat penyandang predikat SNI itu memiliki dagangan khas nan istimewa. Yang paling mencolok pisang. Saking istimewanya, GKR Mangkubumi rutin berbelanja pisang di pasar ini.

"Memang sering dapat pesanan dari GKR Mangkubumi," jelas Ngadiyem, pedagang pisang di Pasar Imogiri saat ditemui di lapaknya kemarin (16/11). Seringnya, putri sulung raja Keraton Ngayogyakarta itu memesan pisang menjelang bulan Sura. Yang dipesan adalah pisang raja. Jenis pisang yang sulit diperoleh Ngadiyem. "Pesannya beberapa tandan. Yang datang kesini pelayannya," tutur nenek lima cucu ini.

Sehari-hari, Ngadiyem memasok pisang keberbagai pasar rakyat di DIY. Di antaranya, Pasar Patangpuluhan, Pasar Legi, dan Pasar Beringharjo. Karena itu, Ngadiyem bisa menjual hingga 200 tandan per hari. "Saya mengambil dari petani di Gunungkidul dan Bantul" paparnya. Jenis pisang yang dijual perempuan 70 tahun ini beragam. Di antaranya pisang kepok, pisang tanduk, dan pisang raja.

Salah satu pelanggan Ngadiyem adalah Sariyem. Perempuan 53 tahun ini adalah pedagang di Pasar Beringharjo. Dia biasa membeli 100 tandan pisang. "Jenis pisangnya macam-macam. Selain itu pisangnya bagus dan harganya murah," tandasnya. (fat/zam)

Pasar Imogiri Penuhi SNI 8152:2021

Pasar Imogiri adalah satu-satunya pasar di DIY dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Predikat tersebut sudah diperoleh sejak tahun 2017 dengan masa berlaku tiga tahun. Pada periode keduanya, dilakukan pembaruan menyesuaikan SNI 8152:2021. Lurah Pasar Imogiri Suharsono mengungkapkan bahwa dalam pergantian SNI periode dua masih menggunakan 8152:2015. Pembaharuan kala itu dilakukan pada akhir 2020. Penyesuaian SNI 8152:2021 kemudian diterapkan saat evaluasi

pertama periode kedua.

"Ada beberapa tambahan dari materi SNI 8152:2021. Pada November ini, kami menerima surveilans periode dua. Surveilans memastikan SNI sesuai standar dan konsisten dijalankan," paparnya dihubungi Radar Jogja Selasa (16/11). Dijelaskan pula, termuat beberapa perubahan dalam SNI 8152:2021. Paling signifikan terdapat pada dokumen. Sebelumnya, terdapat 14 dokumen atau SOP dalam SNI 8152:2015. Kini dipadatkan jadi empat SOP. "Dokumen dipadatkan, tapi lebih rinci ari yang sebelumnya," sebutnya. Sebab empat dokumen SNI 8152:2021 menambahkan poin krusial. Misalnya, pengadaan fisik seperti akses difabel. Bukan hanya penerapan pada los pasar. Tapi juga meliputi fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Selain itu, pasar wajib menerapkan pemilahan sampah. Terdiri dari sampah kering, basah, dan berbahaya. "Itu wajib dipisahkan. Pasar juga harus memiliki tempat penampungan sementara (TPS) yang diambil tiap hari," jabarnya.

Selanjutnya, pasar diwajibkan memiliki lemari pendingin. Guna penyimpanan ikan, daging, dan makanan beku. Suhunya pun diatur maksimal minus 18 derajat celsius. "Kalau di atas itu, harus dikejar memenuhi suhu minus 18 derajat atau lebih rendah," paparnya.

Dia bersyukur Pasar Imogiri dapat penilaian Mutu I Kualitas I oleh surveilans sesuai SNI 8152:2021. Artinya, pasar dengan sekitar 1.500 pedagang ini memenuhi 100 persen penilaian. "Masa berlaku SNI 8152:2021 itu lima tahun. Tapi audit surveilans dilakukan setiap tahun," ungkapnya.

Ditetapkannya Pasar Imogiri masuk kategori SNI 8152:2021 diharapkan dapat jadi pemantik. Bagi pasar-pasar lain di DIY khususnya Bantul. Agar terus berbenah dan menyetarakan diri. "Standar SNI sangat tinggi, baik fisik, pengelolaan, dan dokumen. Tapi semoga pasar lain dapat mengikuti apa yang sudah diterapkan di Pasar Imogiri," tandasnya. (fat)



PASAR NGIPIK

Jajannya Murah, Lezat,
dan Bebas Kimia

Ada wajik, jadah tolo, baceman, tiwul, gatot, hingga klepon. Itulah di antara jajanan tradisional yang masih dijual di Pasar Ngipik. Itu menunjukkan jajanan pasar masih tinggi peminat. "Pembeli masih ada dan cukup banyak," jelas Sutilah, seorang penjual jajanan tradisional di Pasar Ngipik ditemui di lapaknya kemarin (16/11).

Di antara jajanan yang dijualnya adalah wajik, jadah ketan, jadah tolo, dan aneka baceman. Meski langka, Sutilah tetap menjual aneka jajannya dengan harga murah. Pembeli biasanya cukup mengeluarkan Rp 2.000 hingga Rp 5.000. "Kadang, ya, mendapatkan pesanan dari dinas. Untungnya bisa lumayan," ucapnya. Sutilah berjualan setiap hari. Berbagai jajanan itu dibuat sendiri. Seringnya, Sutilah membutuhkan tujuh kilogram ketan mentah saban hari. Namun, bagi penikmat gatot, tiwul, atau klepon tidak bisa sewaktu-waktu berburu jajanan di Pasar Ngipik. Lantaran penjualnya hanya membuka lapak tiap hari Kamis. (fat/zam)

Ada Mi Pentil saat Wage dan Legi

Jika Pasar Gumulan punya Kupat Tahu Mbah Ponco, Pasar Pundong memiliki Mi Pentil. Salah satu penganan

khas Pundong ini berasa gurih nan bertekstur kenyal. Namun, untuk mendapatkan penganan yang juga kerap disebut mi telo ini tidak bisa setiap saat. Pedagang hanya berjualan di Pasar Pundong pada hari-hari tertentu. Persisnya saat pasaran Wage dan Legi berdasar penanggalan kalender Jawa.

Penganan ini berbahan dasar tapioka. Biasanya, pedagang memberikan taburan bawang goreng. Itu sebagai penguat aroma. Tak lupa, pedagang juga menyisipkan sambal pada sepincuk mi pentil. "Bagi yang suka rasa pedas tinggal mencampur saja," kata Sartiyem, seorang pedagang mi pentil di lapaknya Jumat (19/11).

Mi Pentil, kata Sartiyem, punya penggemar sendiri. Barang dagangannya selalu ludes terjual. Padahal, perempuan 41 tahun ini selalu membawa tak kurang 14 kilogram mi pentil siap santap ke pasar. "Berangkat ke pasar jam 06.00. Jam 11.00 sudah habis," ucapnya. Apa memiliki resep rahasia? Perempuan yang tinggal di Pedukuhan Klisat, Srihardono, Pundong, ini menceritakan, ibunya merupakan pedagang mi pentil. Sehingga Sartiyem bersama empat saudaranya memiliki keahlian membuat mi pentil.

"Dari enam bersaudara hanya satu yang nggak bisa," tuturnya. Selain berjualan di pasar, Sartiyem kerap mendapatkan pesanan. Sebagian pemesannya adalah pegawai kantor atau karyawan pabrik. "Tidak ada pengawet, sehingga aman dikonsumsi," tambahnya. (*/zam)

DPRD BANTUL BERDUKA

Anggota Komisi D DPRD Bantul dari Fraksi PDI Perjuangan Timbul Harjana meninggal dunia, duka mendalam bagi keluarga dan koleganya di DPRD Kabupaten Bantul. Timbul Harjana meninggal dunia pada usia 56 tahun pada Rabu (14/9) siang di Rumah Sakit Mitra Sehat Yogyakarta. Timbul Harjana merupakan salah satu Anggota DPRD Kabupaten Bantul dengan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Berbagai kesempatan audiensi masyarakat dengan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, Timbul selalu hadir dan memberikan tanggapan terhadap keluhan-keluhan masyarakat Kabupaten Bantul. Tak hanya itu, Timbul bersama Komisi D DPRD Kabupaten Bantul juga memanggil OPD terkait dengan permasalahan yang disampaikan warga masyarakat untuk mendapatkan pemecahan masalah.

Kabar meninggalnya politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibenarkan Ketua



Fraksi PDIP DPRD Bantul, Suratman, "Iya beliau meninggal dunia kemarin karena sakit," ujar Suratman, Kamis (15/9). Timbul Harjana sosok yang konsisten dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, baik dalam ketugasan DPRD maupun dalam kegiatan bermasyarakat. Salah seorang warga yang melayat menyatakan bahwa mendiang merupakan sosok yang sangat aktif dalam masyarakat tanpa membedakan golongan masyarakat, warga tersebut menuturkan bahwa Timbul juga membantu warga muslim dalam penyelenggaraan ibadah di masjid sekitar mendiang, meskipun mendiang seorang kristiani.



Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, Suratman tidak membeberkan secara gamblang penyakit yang diderita almarhum. Dijelaskan, almarhum sudah sakit sejak 1,5 tahun terakhir. Kendati begitu Timbul selalu semangat bekerja baik kedewanan, di fraksi, maupun sebagai kader partai, "Beliau sebagai pekerja keras dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat," ujarnya.

Jenazah dimakamkan di Makam Pacar, Karanglo, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Sedayu, Bantul Kamis (15) pukul 14.00. Suratman mengaku sangat kehilangan sosok Timbul Harjana. Selain pekerja keras, Timbul Harjana dikenal sebagai anggota dewan yang aktif dan memiliki Riwayat pertemanan



yang sangat baik.

Kolega mending di DPRD Kabupaten Bantul berduka atas meninggalnya Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, Nampak anggota DPRD Kabupaten Bantul silih berganti memberikan ungkapan belasungkawa kepada keluarga mending serta memberikan penghormatan terakhir bagi mending Timbul Harjana.

Almarhum Timbul Harjana menjabat anggota DPRD Bantul selama tiga periode. Selama menjadi anggota dewan almarhum ditugaskan di Komisi D yang membidangi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Dalam sambutannya mewakili DPC PDIP Kabupaten Bantul, Joko Purnomo menyatakan bahwa mending Timbul Harjana merupakan Guru, dan Politisi Senior PDIP yang banyak menelurkan gagasan-gagasan cemerlang untuk membesarkan Partai. Joko Purnomo berjanji bahwa akan meneruskan perjuangan mending Timbul Harjana, selain itu Wakil Bupati Bantul juga berpesan kepada keluarga mending bahwa

mereka tidak sendiri, masih ada keluarga besar PDIP yang akan Bersama dengan keluarga mending Timbul Harjana.





Pemulihan ekonomi, itulah semangat program-program yang tertuang dalam rancangan APBD 2023. Harapannya, perekonomian Kabupaten Bantul pasca pandemi Covid-19 bisa kembali pulih lebih cepat. Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo, S.T menyebut, rancangan APBD 2023 memprioritaskan tiga sector, yakni perindustrian, pertanian, dan pariwisata. Tiga sector ini menghidupi mayoritas warga Bumi Projo tamansari. "Sehingga tiga sector ini harus digenjot agar segera kembali bangkit," tegas Hanung di ruang kerjanya kemarin (26/9).



Menurutnya, rancangan APBD 2023 akan segera dibahas. DPRD Bantul telah mengambil keputusan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2023 11 Agustus. Pembahasan itu, antara lain, bertujuan untuk mengurangi defisit. Ya, dari KUA-PPAS 2023 diketahui ada defisit cukup besar. Mencapai 9,89 persen. Atau sekitar Rp 203 miliar. Padahal, defisit tak boleh lebih dari 4,5 persen. "Proyeksinya, APBD 2023 nanti sekitar Rp 2,2 triliun," sebutnya.

Politikus PDI Perjuangan ini berpendapat mengurangi defisit bukan perkara sulit. Salah satu caranya dengan mengurangi belanja. Di sisi lain, potensi pendapatan daerah juga harus digenjot. "Rumus sederhananya seperti itu," ujarnya.

Kendati begitu, Hanung menekankan, mengurangi belanja tidak serta-merta dengan mencoret beberapa rencana program kegiatan. Pencoretan itu harus melalui serangkaian pertimbangan. Antara lain, memperhatikan indikator kinerja utama (IKU) bupati - wakil bupati. "IKU-nya bupati - wakil bupati pada tahun 2023 itu wajib dilaksanakan. Tidak boleh diotak-atik," ingatnya.

Hanung tak menampik penyusunan rancangan APBD 2023 melalui proses panjang. Dimulai dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, hingga KUA-PPAS. Belum lagi usulan program anggota DPRD melalui instrumen pokok pikiran. "Jadi, program yang sudah masuk rancangan APBD sebenarnya merupakan program penting," katanya.

Kendati begitu, Hanung mengingatkan, kemampuan keuangan daerah harus diperhatikan. Jangan sampai besar pasak dari pada tiang. Konsekuensinya, beberapa program dalam rancangan APBD 2023 yang bisa ditunda

PEMULIHAN EKONOMI TARGET APBD 2023

pelaksanaannya terpaksa akan dicoret. "Agar defisitnya maksimal 4,5 persen," sebutnya.



Politikus yang tinggal di Kapanewon Sewon ini berpendapat rancangan APBD 2023 yang memprioritaskan tiga sector sangat beralasan. Sektor pariwisata contohnya, sector ini menjadi salah satu dalam penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Di mana pada 2022 dipatok Rp 32 miliar. "Berapa jumlah pelaku wisata di objek wisata (obwis) yang dipatok retribusi seperti Pantai Parangtritis yang akan merasakan manfaat ekonominya?" ujarnya.

Menurutnya, destinasi di Bumi Projo tamansari tidak hanya obwis yang dikelola pemkab. Jumlah destinasi yang dikelola masyarakat jauh lebih banyak. Hutan pinus Mangunan, misalnya. Keberadaan destinasi ini terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kapanewon Dlingo. "Ada yang membuka warung kuliner, ada juga yang jualan oleh-oleh," katanya.

Begitu juga dengan sector pertanian, Hanung menyebut ada puluhan ribu warga Kabupaten Bantul yang berprofesi sebagai petani. Pemkab perlu untuk menggelontorkan berbagai program yang menopang sector pertanian. Mulai pembangunan infrastruktur saluran irigasi, pemberian bantuan alat mesin pertanian, hingga peningkatan sumber daya manusia petani. "Dengan memberikan program pelatihan dan pendampingan diversifikasi pertanian," jelasnya.

Jika fokus APBD 2023 terealisasi, Hanung meyakini pemulihan ekonomi di Kabupaten Bantul bisa berjalan lebih cepat. Dengan begitu, harapan pemerintah pusat melalui tagline pulih lebih cepat bangkit lebih kuat bisa terealisasi. "Sehingga masyarakat bisa sejahtera kembali setelah dihajar pandemi Covid-19," harapnya



Temui AKSI DAMAI FSO Kabupaten Bantul



Massa yang berasal dari Forum Silaturahmi Ormas Kabupaten Bantul melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Bantul Jalan Jenderal Sudirman, Jumat (16/9/2022) sore.

Dipimpin Ketua Forum Waljito SH massa tampak membentangkan spanduk berisi kecaman terhadap pernyataan anggota DPR RI Efendi Simbolon yang mengatakan TNI dan ormas adalah gerombolan.

Ucapan itu terlontar dari anggota komisi I asal Fraksi PDI Perjuangan tersebut saat rapat dengar pendapat Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI pada 5 September 2022.

Massa yang mengenakan seragam ormas masing-masing juga meneriakkan yel-yel mereka bukan gerombolan dan NKRI harga mati. Mereka kemudian diterima Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo ST, Wakil Ketua Subkhan Nawawi, anggota DPRD Bantul Jumakir dan Sekretaris DPRD Bantul, Prapta Nugraha MH di halaman gedung dewan.

Karena pernyataan itulah maka mereka menggelar aksi dan murni inisiatif dari hati nurani mereka, tidak ada yang menyuruh ataupun membayar.

Dalam kesempatan tersebut Waljito juga membacakan pernyataan sikap dari forum ormas dan relawan. Pertama, Forum Silaturahmi Ormas Kabupaten Bantul, mendesak kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memberhentikan Efendi Simbolon sebagai anggota DPR RI.

Kedua, Forum Silaturahmi Ormas Kabupaten Bantul mendesak Fraksi PDI Perjuangan untuk mengganti anggota DPR RI atas nama Efendi Simbolon yang telah merusak citra DPR RI terutama Fraksi PDI Perjuangan dengan statemennya yang melecehkan nama TNI dan merusak nama baik ormas.

Ketiga, Forum Silaturahmi Ormas Kabupaten Bantul siap mendukung dan bersinergi dengan TNI, Polri, Pemerintah dan DPR dalam menjaga Kesatuan dan Persatuan Keutuhan NKRI.



"Kami datang untuk menyampaikan ungkapan hati ormas, terkait statemen anggota Komisi 1 DPR RI, Efendi Simbolon yang menyatakan TNI seperti ormas gerombolan. Kami meminta agar pejabat saat membuat narasi dan diksi jangan menyakiti hati nurani rakyat termasuk juga ormas," kata Waljito SH, Ketua Forum.



Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Bapemperda dan Pengambilan Keputusan Propemperda Tahun 2023



Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Bapemperda dan Pengambilan Keputusan Propemperda Tahun 2023

DPRD Bantul menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (propemperda) 2023 sebanyak 11 raperda. Pengambilan keputusan itu diambil melalui rapat paripurna (rapur) Senin (31/10).

Terdiri atas tiga raperda APBD dan delapan raperda non APBD, "jelas Ketua Bapemperda, Drs. Pambudi Mulya, M.Si. saat membacakan laporan Hasil Pembahasan Propemperda Kabupaten Bantul 2023 pada saat rapur. Ketua Bapemperda Drs. Pambudi Mulya, M.Si menuturkan, salah satu fungsi DPRD adalah pembentukan peraturan daerah. Fungsi ini, antara lain, dilaksanakan dengan menyusun perencanaan propemperda bersama pemerintah/bupati. Lantaran propemperda harus disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis. Dengan dasar skala prioritas. dan ditetapkan sebelum penetapan raperda tentang APBD,ujarnya.

Dari 11 raperda, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bantul ini merinci, lima diantaranya merupakan prakarsa DPRD yang meliputi prakarsa empat komisi dan Bapemperda. Sisanya merupakan Prakarsa Bupati. "Propemperda 2023 juga memperhatikan hasil konsultasi dengan gubernur DIY," ungkapnya. Agar berjalan efektif, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bantul, Pambudi menekankan, Bapemperda juga telah menjadwalkan pembahasannya. Pembahasan 11raperda itu dibagi dalam empat triwulan. Per triwulan berbeda, ada satu triwulan yang hanya membahas 1 raperda," sebutnya. Ketika disinggung mengenai kala prioritas, Pambudi menegaskan, 11 raperda untuk menjawab kebutuhan. Baik kebutuhan pemkab maupun masyarakat. Raperda perubahan atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, misalnya. Regulasi ini baru berusia sekitar tiga tahun. Kendati begitu, mantan lurah Donotirto ini menilai, perda itu mendesak diubah. Pemilihan lurah serentak yang digelar 25 September lalu membuka beberapa celah sekaligus kekurangannya.



Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Bapemperda dan Pengambilan Keputusan Propemperda Tahun 2023

Salah satunya, perihal pembobotan kandidat calon lurah dari elemen jenjang pendidikan. Terutama jenjang SMA dengan strata satu. Pasal 39 Ayat 4 Huruf B Perda Nomor 13 Tahun 2019 disebutkan, bobot kandidat calon lurah lulusan SMA sederajat adalah 25. Lalu, S1 atau D4 sebesar 55. Selisihnya 30 poin. "Selisihnya cukup banyak," paparnya.

Nah, pembobotan inilah salah satu celahnya. Menurutnya, pembobotan menjadi persoalan ketika pendaftar kandidat calon lurah lebih dari lima orang. Panitia pemilihan harus membuat seleksi. Agar kontestan calon lurah yang bertarung hanya lima orang. "Pembobotan rentan digunakan untuk menyingkirkan kandidat calon lurah potensial, tapi hanya lulusan SMA," tambahnya. Kendati telah ditetapkan 11 raperda, Pambudi memprediksi Propemperda 2023 berpotensi mengalami perubahan. Sering bertambahnya jumlah raperda di tengah perjalanan. Berdasar Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, jumlah raperda dalam propemperda diperbolehkan penambahan maksimal 25 persen dari jumlah raperda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.



Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Bapemperda dan Pengambilan Keputusan Propemperda Tahun 2023



Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Bapemperda dan Pengambilan Keputusan Propemperda Tahun 2023

Mangut Lele Bu Is

Komplit dengan Lalapan



Bumi Projotamansari - sebutan Kabupaten Bantul - kaya dengan kuliner legendaris. Salah satu kuliner melegenda yang patut dicicipi adalah Mangut Lele Bu Is. Tidak seperti Mangut Lele pada umumnya, sajian menu warung kuliner yang terletak di Jl. Imogiri Barat Km 12 Dusun Jetis, Sumberagung, Jetis ini lebih komplet.

Menurut Ari Astuti, pemilik Mangut Lele Bu Is, ada beragam lalapan pelengkap yang disajikan bersama Mangut Lele. Di antaranya, taoge, daun pepaya, bayam,

kecipir dan daun untas. Semuanya serba rebus."Ada oseng-oseng lombok hijau. Juga, ada sambal terasinya," jelas Ari di warungnya. Seperti namanya, Mangut Lele ini disajikan berkuah. Rasanya menggoda lidah meski sedikit terasa pedas. Menurutnya, rasa Mangut Lele tak pernah berubah. Meski pengelolaan warung yang terletak di utara traffick light simpang empat Jetis ini telah turun ke generasi kedua.

Rahasianya terletak pada berbagai bumbu rempah yang digunakan untuk memasak kuahnya."Lelanya digoreng dulu sebelum dimasak," jelas menantu pendiri Warung Mangut Bu Is ini. Dalam kesempatan itu, Ari menambahkan, warungnya buka setiap hari. Mulai pukul 08.00 hingga pukul 20.00.

Erata setiap hari warung kuliner ini memasak sekitar 20-kilogram lele. Atau sekitar 200 porsi. Kendati cukup banyak, Ari menyebut ratusan porsi ini ludes terjual."Satu porsi Rp 20 ribu. Lengkap dengan minumannya. Seperti es jeruk," katanya. Selain warga sekitar, penikmat Mangut Lele Bu Is ini adalah wisatawan. Tak jarang wisatawan dari hutan pinus Mangunan mampir sekadar untuk memanjakan lidah.

SATE PAK BARI

Legenda Sate Bantul, Jujugan Artis Ibukota

BANTUL - Ada Darius Sinathrya, Yayan Ruhiyan, Iko Uwais, Hanung Bramantyo, dan Aura Kasih. Itulah sederet artis papan atas yang pernah dan sering mampir menikmati kuliner sate klatak Pak Bari.

"Hampir tiap bulan atau ketika ada even di Jogja pasti ada (artis) yang kesini," jelas Pak Bari sapaan akrab Sabari pemilik warung Sate Klatak Pak Bari.

Sate klatak Pak Bari merupakan satu di antara puluhan warung kuliner serupa di Desa Wonokromo, Pleret. Tusuk yang digunakan juga jari-jari sepeda. Kendati begitu, sate klatak Pak Bari berbeda. Letak perbedaannya salah satunya pada bumbu. Menurutnya, sate klatak miliknya hanya menggunakan garam. Bumbu dapur berasa asin ini ditaburkan pada daging kambing sebelum ditusuk.

"Yang lain pakai bawang putih dan kemiri," ucapnya. Kendatihanya dengan garam, rasa yang ditawarkan menggoda lidah. Rasa khas ini kian lengkap dengan perpaduan daging kambing muda. Menurutnya, setiap hari menyembelih tiga ekor kambing. Usianya sekitar delapan bulanan.

"Weduse ijeh lucu-lucune," kelakarnya.

Ada menu lain yang dijual. Di antaranya sate bumbu, sate goreng, tongseng, kicik, gulai babat dan nasi goreng. Bari menyebut harga satu porsi sate klatak dipatok Rp 20 ribu. Isinya dua tusuk.

"Minumannya es teh, teh panas, es jeruk dan jeruk



panas," tambahnya.

Letak perbedaan lain sate klatak Pak Bari adalah lokasinya. Mayoritas warung kuliner sate klatak di Wonokromo berupa kios. Adapun sate klatak Pak Bari berada di Pasar Wonokromo. Memanfaatkan deretan los pasar.

"Pindah ke pasar Wonokromo yang baru pada 2010," ungkapnya.

Akses menuju ke sate klatak Pak Bari dari Kota Jogja sangat mudah. Akses yang paling mudah melalui Jl. Imogiri Timur. Sesampainya di simpang empat Jejeran, wisatawan tinggal keselatan sekitar 15 meter. Lalu belok ke kiri. Nah, beberapa meter wisatawan bakal melihat poster bertuliskan Sate Klatak Pak Bari di sebelah kanan jalan.

"Buka mulai pukul 18.30 sampai pukul 01.00," katanya.

SIDAK KOMISI D DPRD

Fasilitas Pendidikan Dasar di Bantul



Komisi D DPRD didampingi Disdikpora Kabupaten Bantul Sidak SD N Sawit

Komisi D DPRD Kabupaten Bantul menemukan tujuh sekolah dasar negeri (SDN) di Bantul rusak dan membutuhkan perbaikan karena membahayakan jika digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ketujuh SDN yang rusak itu ditemukan setelah Komisi D DPRD Bantul yang membidangi pendidikan melakukan inspeksi mendadak (sidak), Selasa (4/10/2022) lalu.

Ketua Komisi D DPRD Bantul Suratman mengatakan ketujuh SDN yang rusak meliputi SDN Lemah Rubuh (Kecamatan Imogiri), SDN Imogiri (Imogiri), SDN Kadipiro (Kasih), SDN Sawit (Sewon), SDN Klagaran (Sanden), SDN 3 Bantul (Bantul), dan SDN 1 Wijirejo (Pandak).

"Rata-rata kerusakannya adalah bangunan ruang kelas dan kantor. Bahkan dua ruang kelas SDN Sawit di Sewon tidak bisa digunakan karena atapnya sudah lapuk dan membahayakan jika digunakan," kata Suratman saat ditemui di DPRD Bantul, Rabu (5/10/2022).

Suratman mengatakan sidak dilakukan sebagai bagian dari tugas Komisi D untuk mengawasi TK, SD, dan SMP. Sejauh ini, DPRD Bantul baru sidak sejumlah SD dan menemukan banyak bangunan SDN yang rusak dan kondisinya memprihatinkan.



Komisi D DPRD Kabupaten Bantul memeriksa ruang kelas SD N Sawit

Setelah melakukan sidak dan pendataan bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Komisi D akan mengupayakan perbaikan gedung sekolah tersebut menggunakan APBD 2023 mendatang. "Kalau anggaran belanja daerah 2023 tidak memungkinkan, akan kami usulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi [Kemendikbud-Ristek] melalui dana alokasi khusus [DAK]," ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP) ini berharap Pemerintah Kabupaten Bantul mendata kembali semua gedung sekolah kemudian membuat skala prioritas untuk perbaikan, terutama sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan butuh perbaikan segera, seperti SDN Sawit. Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul Yasmuri menambahkan SDN Sawit sangat memprihatinkan, karena dua ruangan kelas sama sekali tidak bisa digunakan, sehingga siswa harus menggunakan ruang lainnya untuk kegiatan belajar mengajar. Menurutnya SDN tersebut masuk prioritas untuk direhab. "Menurut saya SDN Sawit perlu rehab total," ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan SDN yang mengalami kerusakan rata-rata sejak 2006 belum pernah diperbaiki. Selain rusak ruang kelasnya, gedung sekolah juga perlu dicat kembali supaya menarik sebagai ruang belajar mengajar bagi siswa.



Sementara itu, Kepala Bidang SD Disdikpora Bantul Edy Sutrisno mengakui ada sejumlah SDN yang kondisinya memprihatinkan dan butuh rehabilitasi. Jawatannya masih mendata jumlah gedung SD yang rusak. Sekolah yang rusak rata-rata dibangun 2006 atau setelah gempa Bumi.

Dari hasil sidak bersama Komisi D DPRD Bantul, Disdikpora Bantul mengusulkan perbaikan gedung sekolah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar bisa diakomodasi dalam APBD 2023, "Insya Allah untuk SDN Sawit menjadi prioritas utama usulan dewan dan dinas untuk direhab 2023





SOSIALISASI EDUKASI KANKER

Yayasan Edukasi Kanker Indonesia (YEKI) memberikan edukasi tentang kanker kepada para istri anggota DPRD, anggota DPRD Kabupaten Bantul perempuan, dan pegawai perempuan di lingkup DPRD di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bantul pada Jumat, (11/11/2022). Program tersebut merupakan kerja sama antara YEKI dengan DPRD Kabupaten Bantul.

Ketua YEKI, Harti Buryaningsih, mengatakan selama ini edukasi tentang kanker sangat jarang diberikan. Oleh karena itu, banyak orang secara tak sadar telah menderita kanker stadium 2B. Tegasnya, kondisi tersebut bukan hanya akan memengaruhi penderita namun juga satu keluarga.

"Yang sakit memang satu orang tapi yang menanggung bisa satu keluarga. Dampaknya akan mengarah pada ketahanan keluarga. Operasi kanker memang gratis [melalui BPJS] tetapi perjalanan kesana [rumah sakit] memangnya gratis, memangnya hanya sekali. Bisa 50 kali itu. Apalagi dilakukan hingga dua tahun apa tidak bikin pingsan. Dengan begitu ketahanan keluarga jadi goncang," kata Harti ditemui di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bantul pada Jumat, (11/11/2022).

Jelasnya, masyarakat jarang mau memeriksakan diri terkait dengan kemungkinan menderita kanker tingkat lanjut. Hal tersebut, katanya, disebabkan belum meratanya edukasi dan masyarakat belum tahu mekanis memeriksakan diri.

Padaahal, apabila kanker memasuki stadium 2B, seseorang akan menjalani pengobatan yang lama dan harus menjalani operasi. Jika kanker belum memasuki tahap tersebut, operasi tidak perlu dilakukan.

"Dengan tujuan itulah saya datang ke DPRD Kabupaten Bantul. Saya ingin DPRD menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat karena mereka adalah perpanjangan tangan dari masyarakat," katanya.

Harti mendorong masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan karena hal tersebut menjadi upaya sederhana yang dapat dilakukan. "Mencegah itu lebih mudah dan murah. Tapi kenapa masih ada orang yang tahu-tahu stadium 2B itu karena mereka tidak tahu. Padahal awal dari penderitaan itu setelah dioperasi karena setelah itu pasti berlanjut. Operasi bukan pengobatan tapi tindakan medis. Kalau masyarakat tahu lebih dini maka tidak akan terjadi prevalensi yang tinggi," lanjutnya.

Lebih jauh, dia mengatakan prevalensi kanker di Indonesia meningkat dari 2013 sebanyak 1,4 per 1000 penduduk menjadi 1,79 per 1000 penduduk pada 2018. Sementara itu, DIY menjadi daerah dengan prevalensi kanker tertinggi dengan 4,86 per 1000 penduduk di tahun 2018.

Dengan begitu, Harti mendorong DPRD Kabupaten Bantul untuk menindaklanjuti sosialisasi yang telah diadakan YEKI.

"Kalau setelah ini DPRD diam saja, ya gimana? Mereka jadi anggota dewan malah diam saja ada masyarakat yang seperti ini [menderita kanker]. Harus kami dorong agar mengubah keputusan dan semoga nantinya benar ada keputusan yang mengubah masyarakat," ujar dia.

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, Anton Vektor, mengatakan bahwa sasaran awal edukasi tersebut adalah perempuan. Peserta merupakan istri anggota DPRD, anggota DPRD perempuan, karyawati sekretariat DPRD dengan total undangan 90 peserta. Hal tersebut merupakan permintaan YEKI ketika mereka mengirim surat permohonan sosialisasi kepada DPRD Kabupaten Bantul.

Anton berharap dengan adanya sosialisasi oleh YEKI, peserta dapat menyebarkan informasi tersebut kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Bantul, Sri Supriatini, menegaskan perempuan sebagai sasaran sosialisasi menjadi penting karena mereka menjadi subjek yang sangat berkemungkinan terjangkit kanker.

"Terhusus karena perempuan itu kan motor di keluarga. Sehingga bisa mendorong keluarga untuk membangun pola hidup sehat utamanya terkait kanker tak terkecuali kepada masyarakat," kata Supriatini ditemui di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bantul pada Jumat, (11/11/2022).

Dia juga menegaskan laki-laki perlu mendapat edukasi tentang kanker. "Penting juga bagi laki-laki. Yang namanya menjaga dan berpola hidup sehat itu peran laki-laki sangat dibutuhkan karena apabila dalam keluarga tidak saling mendukung, saling menjaga, dan saling pengertian akan usaha-usahanya tidak akan maksimal," katanya.



PEMBANGUNAN SEBAGAI ASPEK PENTING DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



Dalam menerapkan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul bergerak cepat mengusulkan sejumlah usulan peraturan daerah (perda) tentang beberapa hal terkait dengan pembangunan. Perda tersebut diharapkan dapat memudahkan proses pembangunan untuk kemakmuran masyarakat Bumi Projo Tamansari.

Ketua Komisi C DPRD Bantul, Dwi Kristiantoro mengaku telah merencanakan beberapa perda prakarsa pada tahun 2022. Pada triwulan I/2022 perda yakni Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Perda Perubahan tentang Perumahan.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bantul mengatakan "Ada perubahan peraturan dari Pusat yang mengamanatkan yang dulu IMB [Izin Mendirikan Bangunan] sekarang diubah menjadi PBG. Kalau perda yang sudah ada penyelenggaraannya, kalau penggantinya IMB itu PBG tapi kepanjangannya Persetujuan Bangunan Gedung. Ini memang harus disesuaikan, karena Bantul tidak bisa memungut pajak atau retribusi ketika ini tidak disesuaikan dengan amanat dari undang-undang,"

Sementara soal penertiban PBG, khususnya untuk kategori bangunan rumah tinggal tipe sederhana atau tipe 45 ke bawah, Dwi mengupayakan agar administrasinya tidak memberatkan masyarakat. Menurutnya dokumen gambar bangunan yang disertakan membutuhkan jasa ahli. Sementara tak semua warga dapat menjangkau penyedia jasa gambar bangunan tersebut.

"Kalau membuat [gambar bangunan] sendiri biasanya kadang tidak diterima. Memang butuh tenaga teknis yang membuat. Dalam penyusunan draf ini, khusus tipe itu dibuatkan semacam templat gambar dan juga hitungannya. Sehingga nanti kalau masyarakat mengajukan PBG tinggal mengambil itu, jadi tidak lagi harus membayar jasa tenaga ahlinya, itu kan agak lumayan [mahal]," Adanya usulan ini, diharapkan Dwi dapat mendorong kepemilikan PBG di kalangan masyarakat, karena prosesnya yang dipermudah. "Sehingga kami berharap semua

masyarakat Bantul ketika membangun satu bangunan semua ber-IMB gitu," ujarnya

"Tipe-tipe kecil, sederhana atau sangat sederhana kendalanya adalah terkait biaya, ini sudah kita gerus biayanya agar terjangkau. Dengan adanya templat itu tadi," jelasnya.

Perumahan

Perda lainnya yang digagas oleh DPRD Bantul di triwulan pertama yakni perubahan tentang Perda Perumahan. Dijelaskan Dwi salah satu aspek yang dibahas ialah terkait kesulitan penyediaan lahan pemakaman di wilayah kapanewon di mana perumahan itu berdiri.

"Sehingga pengembang harus menyediakan lahan makam, bagi perumahan yang dia bangun tapi makamnya itu di lokasi di wilayah Kecamatan di mana perumahan itu berada," ujarnya

"Itu menyulitkan, artinya belum tentu juga akan mudah tersedia. Ini sepertinya akan diubah, dipindah, yang mana bangunan makam itu mungkin dibangun bisa saja di luar kapanewon. Atau mungkin karena Bantul sudah punya pemakaman umum, ini bisa digunakan oleh warga yang membeli perumahan."





▲ KOMISI C

Kepadatan Penduduk, Kriminalitas dan Kemandirian Wilayah.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bantul menyoroti keberadaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) di Kapanewon Kasihan masih minim. Tak terkecuali di wilayah yang berbatasan dengan Kota Jogja maupun Kabupaten Sleman. Padahal, keberadaan LPJU tidak hanya mengurangi laka lantas saat malam hari. Lebih dari itu, juga bisa mengurangi angka kriminalitas. “Karena klithih juga banyak. Ini meresahkan warga,” ungkapnya.

Karena itu, Johan meminta organisasi perangkat daerah terkait memperhatikan kondisi di wilayah perbatasan. Setidaknya dengan menambah pemasangan LPJU. Terutama di titik-titik yang rawan terjadi kriminalitas. “Karena di Kapanewon Kasihan, kan, juga banyak kampus perguruan tinggi (PT),” jelasnya.

Ya, ada beberapa kampus PT besar di Kapanewon Kasihan. Persisnya di wilayah Kalurahan Tamantirto. Sebut saja Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Keberadaan beberapa kampus ini turut menyumbang peningkatan perekonomian warga sekitar. Bisnis kuliner, indkos, hingga penatu tumbuh subur. “Termasuk toko modern,” katanya.

Karena itu, Johan sepakat Perda Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan diubah. Sebagaimana diketahui, DPRD Bantul telah membentuk pansus perubahan Raperda Nomor 21 Tahun 2018.

Johan mengaku perubahan raperda itu berpotensi mengubah ketentuan jarak toko modern berjejaring dengan pasar rakyat. Kendati begitu, Johan meyakini, perubahan ketentuan jarak itu berdasar beragam pertimbangan. Seperti kepadatan penduduk. Sehingga perubahan ketentuan jarak itu tetap

‘mengamankan’ pasar rakyat dari gempuran modernisasi. “Semua punya segmen pembeli masing-masing,” ujarnya.

Yang tak kalah penting adalah perubahan raperda itu bisa membuka kran pendirian mal di Bumi Projo Tamansari. Menurutnya, Kabupaten Bantul sudah waktunya mengizinkan pendirian mal. Toh, keberadaan mal diyakini bisa menarik pemodal untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Bantul.

“Kalau nilai investasi di Bantul tinggi otomatis pendapatan daerah juga bakal naik. Kabupaten Bantul bisa lebih mandiri ke depan,”

Dalam meningkatkan produktifitas masyarakat, komisi C DPRD Kabupaten Bantul menekankan untuk pemerintah daerah dapat memperbaiki sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan usaha masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Komisi C DPRD akan mengawal pembangunan tersebut dan berharap masyarakat mampu memberikan masukan serta aspirasinya. Sehingga pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Subhan Nawwawi
Wakil Ketua II DPRD Kab. Bantul

Hanung Raharjo, S.T.
Ketua DPRD Kab. Bantul

Nur Subyantoro, S.I.Kom.
Wakil Ketua I DPRD Kab. Bantul

Damba Aktivis
Wakil Ketua III DPRD Kab. Bantul

▲ Pimpinan DPRD



Muhamad Agusalim
Ketua KOMISI A

Jumakir
Sekretaris KOMISI A

Suratun, S.H.
Wakil Ketua KOMISI A

Anggota KOMISI A



Drs. Pambudi Mulya, M.Si.



Anton Wahana, S.Sos.



Sefli Indradewi, S.Pd., M.Pd.



Sigit Nursyam P, S.Si.



Teguh Santoso, S.E.



Novi Sarhati

▲ KOMISI A

Anggota KOMISI B



Wildan Nafis, S.E.
Ketua KOMISI B

Arif Haryanto, S.Si.
Sekretaris KOMISI B

Aryunadi, S.E.
Wakil Ketua KOMISI B



Endro Sulastomo, S.H.



Saryanto



Jumirin



Mahmudin, S.P.



Heru Sudibyo, S.Sos, M.M.



Edy Prabowo, S.E.



Bibit Rustanta, S.H.

▲ KOMISI B

Anggota KOMISI D



Suratman
Ketua KOMISI D

Drs. Ahmad Agus S, M.Pd.I.
Sekretaris KOMISI D

H. Yasmuri, S.Pd, M.Pd.I
Wakil Ketua KOMISI D



Nur Yuni A., S.Sos, S.H.



Purwana



Enggar Suryo J, S.E., M.M.



H.R. Ichwan Tamrin M, S.E.



Paidi, S.I.P.



Eko Sutrisno Aji



Suradal



Drs. Supriyono, M.Si.

▲ KOMISI D